

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN
MASYARAKAT DESA DI DESA WAMBO KECAMATAN
GUPURA KABUPATEN LANNY JAYA**

**HETRONAP KOGOYA
JOHNY HANNY POSUMAH
MARTHA OGOTAN**

***ABSTRACT :** This research moved from the initial observation that the role of village heads in rural community development Wambo District of Gupura not going according to the expectations of society. Thus, this study aims to determine how the role of village heads in rural community development in the village of the District Wambo Gupura Lanny Jaya regency.*

By applying the methods of descriptive and qualitative approach, the informant taken as many as 10 persons from the village officials and members of the BPD, then conducted in-depth interviews and the results are analyzed by applying interactive techniques. The research results can be presented as follows: (1) That the general role of village heads in government affairs, development and community development in rural villages Wambo going pretty well, although not achieve optimal results. (2) That there are still some programs / village development plans that can not be realized. This is due to the adequacy of the development budget is still low, as well as bureaucratic obstacles, span of control and geographical conditions of rural areas difficult to reach so ADD and Special Autonomy Fund p are experiencing delays.

Advice can be given, among other things: to optimize the role of village heads in the implementation of rural development, it is suggested that local governments, especially Lanny Jaya regency government needs to be allocated compensation in the form of performance benefits for the village chief achievers for each month; and to ensure the realization of all the plans / programs of rural development, particularly in the village of Wambo, it is recommended that in the preparation and adoption of program / village development plans need to take into consideration the financial capacity of rural finance program / plan to build the village.

***Keywords:** Role of the Village Head, Development of rural communities*

Pendahuluan

Salah satu ciri yang menonjol dari bangsa Indonesia selama ini ialah keterkaitan dan orientasi pada pembangunan nasional di segala bidang yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkesinambungan dengan penekanan-penekanan tertentu pada setiap tahap sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman serta kepentingan masyarakat.

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan

kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan Negara yang maju dan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Menurut kesatuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan dipertegas kembali dalam peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa desa atau yang disebut dengan kata lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional dan

berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pemikiran dalam peraturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa dengan melalui pemerintah desa dapat diberi penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dan urusan. Mariun (dalam Siswanto, 1988) menjelaskan perbedaan istilah pemerintah dan pemerintahan adalah bahwa “istilah pemerintahan menunjuk kepada bidang tugas pekerjaan atau fungsi; sedangkan istilah pemerintah menunjuk kepada badan organ atau alat perlengkapan yang menjalankan bidang tugas pekerjaan atau fungsi itu”. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa istilah pemerintahan menunjuk kepada objek sedangkan istilah pemerintah menunjuk kepada subjek. Pemerintahan Desa menurut UU No. 32 Tahun 2004 dan PP. 72 Tahun 2005, diatur sebagai berikut :

1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam System Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan, dan Unsur Kewilayaan.
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang meraupkan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan desa, berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Desa berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/ kota, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar tahun 19 Landasan pemikiran dalam pengaturan dalam mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut sangat penting, karena pemerintah desa beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah kekuasaannya. Karena itu, peranan mereka demikian penting dan banyak menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Oleh sebab itu diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh.

Dengan demikian kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan.

Desa merupakan dasar dari satuan pemerintah yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan Negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan desa dalam perencanaan pembangunan. Dalam arti masyarakat ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurus rumah tangga kelurahannya, sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh desa tersebut. Bicara Soal Pembangunan Desa Saparin (1986) Pembangunan masyarakat desa merupakan pengkhususan dari pengertian *Community Development* yang berarti pembangunan masyarakat sebagai keseluruhan, dengan tujuan untuk menaikkan penghasilan serta taraf hidup masyarakat yang bersangkutan.

Dari beberapa pengertian diatas meskipun terdapat perbedaan dan tekanan masih dapat dilihat adanya hal-hal yang bersifat pokok antara lain :

- (1). Pembangunan Desa merupakan proses aktivitas yang sengaja dilakukan
- (2). Pembangunan Desa merupakan aktivitas kebersamaan dari warga masyarakat
- (3). Pembangunan Desa lebih menekankan pada swadaya dan peningkatan kemampuan masyarakatnya

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala Desa merupakan pimpinan yang tertinggi di desa. Kepala desa mempunyai andel penting didalam kemajuan suatu desa. Sebagai seorang pemimpin kepala desa dituntut untuk bias melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama.

Peranan kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembangunan desa yang dilakukan masih belum efektif dan efisien, dalam hal ini Kepala Desa masih memiliki kelemahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembangunan desa yang masih belum dilakukan dengan baik, sehingga tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Kondisi ini diindikasikan dengan masih relatif rendahnya keberhasilan pembangunan masyarakat di desa ini, antara lain, rata-rata tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, pelayanan yang diberikan pemerintah desa masih belum memuaskan masyarakat pengguna layanan, serta pembangunan infrastruktur belum memadai.

Berdasarkan hasil amatan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil pokok bahasan dengan judul : Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Masyarakat Desa, di Desa Wambo Kecamatan Gupura Kabupaten Lanny Jaya.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Mengacu pada karakteristik permasalahannya, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif

dengan metode deskriptif, yaitu metode dan pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument utama. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Disebut sebagai metode kualitatif karena hanya ada satu variabel dan data yang terkumpul analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Menurut Nasution (2001) dalam penelitian kualitatif, data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti (Sugiyono,2009).

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada permasalahan, tujuan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi fokus penelitian adalah Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Desa di Desa Wambo Kecamatan Gupura Kabupaten Lanny Jaya. Peranan Kepala desa yang dimaksudkan adalah bahwa kepala desa dalam menjalankan peranannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Kepala desa diberi tugas untuk menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa. Urusan

kemasyarakatan ialah pembedayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat-istiadat.

C. Informan

Informan adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, dia harus punya banyak pengalaman tentang latar penelitian. Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar tau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. (Meleong, 2001:13)

Informan yang akan di wawancarai sebanyak 10 orang, terdiri :

1. Kepala desa : 1 orang
2. Sekretaris desa : 1 orang
3. Ketua dan Anggota BPD :3 orang
4. Tokoh Masyarakat/Adat :5 orang

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data peneliti akan menghadapi sejumlah besar sumber-sumber data yang berupa buku kepustakaan. Pertama-pertama yang harus dilakukan peneliti adalah menentukan lokasi-lokasi sumber data, serta pusat-pusat studi. Setelah menentukan lokasi sumber data, mulailah melakukan pengumpulan data. (Kaelan, 2012:163).

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama. Atas pertimbangan inilah maka dalam pengumpulan data pada penelitian ini digunakan beberapa teknik sebagai berikut :

1. Wawancara (interview) :
Wawancara dilakukan pada informan yang telah ditentukan untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah yang

diteliti. Dalam wawancara ini digunakan pedoman wawancara sebagai panduan wawancara agar dapat lebih terfokus dan konsistensi hasil penelitiannya.

2. Studi dokumentasi : Studi dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder pendukung data primer hasil wawancara. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang telah tersedia di kantor desa.
3. Observasi : untuk memperoleh informasi serta gambaran empirik tentang data yang diperlukan dengan mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif maka teknik analisis data yaitu untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul. (Sugiyono, 2009). Analisa data pada dasarnya sudah dilakukan bersamaan dengan proses pengamatan dan wawancara dengan informan saat penelitian yang dilengkapi dengan data sekunder.

Dalam penelitian ini, data yang terkumpul akan dianalisis secara Deskriptif Analitis. Penelitian secara deskriptif analitis di sini dimaksudkan untuk mendeskripsikan data penelitian sesuai dengan konsep-konsep yang akan diteliti, tanpa melakukan pengujian hipotesis, karena dalam penelitian ini penulis tidak membuat hipotesis. Disamping melakukan analisis, hasil penelitian akan diinterpretasikan dan diuraikan secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran mengenai situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner (daftar pertanyaan penelitian) akan dianalisis melalui teknik analisis tabel frekuensi (persentase) untuk

melengkapi atau menguatkan hasil penelitian ini.

Selain itu, dalam proses analisa data, penulis juga mengembangkan pola intersubjektif melalui 'brainstoming' dengan orang lain dan konsisten menempatkan diri sebagai seorang peneliti agar subyektifitas penulisan yang mungkin timbul baik secara sadar ataupun tidak sadar dapat dihindari.

PEMBAHASAN

Berdasarkan rangkuman hasil wawancara di atas, selanjutnya akan dibahas lebih jauh berkenaan dengan tiga tema pokok, yaitu :

1. Peranan Kepala Desa Dalam Urusan Pemerintahan Desa

Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum kepala desa Wambo cukup baik dalam menjalankan peranannya, terutama dibidang urusan pemerintahan desa. Kepala desa sebagai administrator pemerintahan desa di desa Wambo sekaligus sebagai pemimpin formal di tingkat desa memperlihatkan kemampuannya dalam melakukan komunikasi dan koordinasi dengan mitra kerjanya, yakni Badan Musyawarah Kampung (BMK) atau BPD dan stakeholders lainnya. Disisi lain Kepala desa mampu memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama berkaitan dengan keterpenuhan hak-hak masyarakat sebagai warga negara, seperti hak mendapatkan identitas diri dan keluarga, serta hak-hak sipil lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kemampuan kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas pokok pemerintahan desa mencerminkan kemampuan administratif pemerintahan desa itu sendiri, sementara kemampuan

administratif pemerintahan desa didukung oleh bangunan struktur organisasi pemerintahan desa yang kuat dan menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dalam bingkai kemitraan antara Kepala Desa dan BMK atau BPD. Produk dari kerja kemitraan tersebut adalah dalam bentuk peraturan desa sebagai panduan dan pedoman dalam melaksanakan misi desa menuju kemandiriannya.

2. Peranan Kepala Desa dalam Urusan Pembangunan Desa

Mengacu pada rangkuman hasil wawancara diketahui bahwa di dalam urusan pembangunan desa, kepala desa berperan cukup aktif dalam melakukan penyusunan rencana pembangunan desa bersama mitranya BMK melalui forum musyawarah desa. Produk yang dihasilkan adalah Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam setiap tahun anggaran.

Namun demikian, tidak semua rencana/program pembangunan desa dapat terealisasi dengan baik. Hal ini terkendala oleh tingkat kecukupan anggaran desa yang masih rendah, juga berbelitnya birokrasi, rentang kendali dan letak geografis desa yang sulit dijangkau merupakan faktor penghambat terjadinya keterlambatan pencairan ADD dan dana Otsus.

Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa peranan kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan desa berlangsung cukup baik, namun terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan keterlambatan pencairan dana ADD dan dana Otsus yang seharusnya sebagai solusi bagi belum memadainya anggaran pembangunan desa.

3. Peranan Kepala Desa Dalam Urusan Pembinaan masyarakat Desa

Dari hasil rangkuman wawancara, diketahui bahwa di dalam urusan pembinaan masyarakat desa, kepala desa cukup berperan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat desa, terutama disektor ekonomi/pertanian tanaman pangan, sektor pendidikan, kesehatan dan adat-istiadat. Namun demikian ada ada informan yang memberikan catatan khusus, di mana pembangunan posyandu belum dapat diselesaikan sehingga kegiatan penimbangan Balita dilaksanakan di rumah Kepala Desa.

Sejalan dengan hasil-hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan kemampuan administratif dibidang pembangunan, menurut Katsz (1969) adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui dukungan sistem-sistem pendukung pembangunan. Sistem-sistem tersebut terdiri dari (1) pelaksanaan tugas (*performance*); (2) Struktur (*structure*); dan (3) hubungan dengan lingkungan (*Environmental linkagers*). Dengan kata lain, bahwa Kemampuan administratif adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan tugas, didukung oleh struktur organisasi dan dukungan lingkungan (Ndraha, 1987).

Ketiga sistem pendukung kearah pencapaian tujuan pembangunan (desa) diatas saling terkait satu dengan lainnya dan memiliki fungsi serta peranan masing-masing. Dukungan Lingkungan memiliki fungsi yang paling mendasar sebagai pendukung atau penyangga utama berdirinya suatu sistem pemerintahan desa secara keseluruhan, sementara dukungan struktur merupakan kerangka bangunan yang berdiri tegak diatas landasan dukungan lingkungan, sedangkan Pelaksanaan Tugas (*performance*) adalah motor penggerak pelaksanaan pemerintahan

dan pembangunan itu sendiri. Lemahnya ketiga sistem pendukung diatas berarti melemah pula kemampuan pemerintahan desa yang pada gilirannya akan menyeret sistem pemerintahan dan pembangunan desa secara keseluruhan sehingga menghambat pencapaian sasaran dan tujuan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa itu sendiri.

Kajian lebih lanjut menunjukkan bahwa lemahnya Kemampuan pemerintah desa, menurut pengamatan sebagian ahli disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah lemahnya struktur dan kultur pedesaan itu sendiri. Sedangkan lemahnya kultur dan struktur pedesaan yang pada dasarnya terletak (1) pada lemahnya Pelaksanaan Tugas (performance) pemerintah desa khususnya dan administrasi pemerintahan dan administrasi pembangunan desa umumnya serta hal ini bersifat struktural dan merupakan gejala umum yang terdapat dikalangan pemerintah negara-negara sedang berkembang; (2) selain itu, dalam menghadapi perubahan sosial (terkait perubahan budaya) yang semakin cepat dan mengglobal, Kepemimpinan Pedesaan, khususnya Kepala Desa dan perangkatnya, Lembaga-lembaga Desa, serta pemimpin-pemimpin formal lainnya di desa belum mampu berperan secara optimal.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa secara kumulatif ketiga sistem pendukung pembangunan yang meliputi : dukungan lingkungan, dukungan struktur dan pelaksanaan tugas pemerintahan dapat memacu pencapaian tujuan atau bahkan menghambat pencapaian sasaran-sasaran Pembangunan Desa itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa Pemerintah Desa, khususnya Kepala Desa yang berkemampuan dapat mendorong ketercapaian Pembangunan Desa dalam arti (1) mampu memperbaiki kondisi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat; (2) mampu meningkatkan partisipasi

masyarakat; dan (3) mampu menumbuh-kembangkan tingkat kemandirian masyarakat desa. Dengan demikian, jelaslah bahwa keterkaitan antara ketiga Sistem pendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa merupakan bagian dari faktor-faktor Sosial budaya yang menentukan tingkat Keberhasilan Pembangunan Desa yang merupakan kesimpulan teoritis sekaligus sebagai Kerangka berpikir dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Mengacu pada hasil-hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan akhir sebagai berikut :

1. Bahwa secara umum peranan kepala desa dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat desa di desa Wambo berjalan cukup baik, walaupun belum mencapai hasil yang optimal.
2. Bahwa masih terdapat beberapa program/rencana pembangunan desa yang belum dapat terealisasi. Hal ini disebabkan oleh tingkat kecukupan anggaran pembangunan yang masih rendah, serta hambatan birokrasi, rentang kendali dan kondisi geografis wilayah desa yang sulit terjangkau sehingga ADD dan Dana Otsus sering mengalami keterlambatan pencairannya.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memberikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa, maka disarankan agar pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Lanny Jaya perlu

menganggarkan dana kompensasi dalam bentuk tunjangan kinerja bagi Kepala Desa yang berprestasi untuk setiap bulan.

2. Untuk menjamin terealisasinya semua rencana/program pembangunan desa, khususnya di Desa Wambo, maka disarankan agar dalam penyusunan dan penetapan program/rencana pembangunan desa perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dalam membiayai program/rencana pembangunan desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaelan H. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta : Paradikma
- Meleong. Lexi, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosada Karya
- Saparin, Sumber, 1986, *Tata Pemerintahan Dan Adminitrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Siswanto Redjo, 1988, *Manajemen Tenaga Kerja*, Bandung : Sinar Baru.
- Sugiyono, 2009, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.
- , 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfa Beta
- Sumber lain :*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa